



BERBINCANG - Ketua KPU DIY, Achmad Shidqi (kanan) dan anggota Bawaslu DIY, Sutrisnowati (tengah) dalam Podcast Mata Lokal Memilih, Selasa (28/11).

Peserta Pemilu dan Masyarakat Wajib Jaga Kampanye Damai

YOGYA, TRIBUN - Tahapan pemilu kini telah memasuki masa kampanye. Tahapan ini berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Ketua KPU DIY, Achmad Shidqi, mengatakan peserta pemilu diperbolehkan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan citra diri selama masa kampanye ini. Namun, tentu harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

"Hari pertama kampanye ini belum ada data yang masuk. Kami punya aplikasi sistem aplikasi kampanye dan dana kampanye. Nah semua peserta Pemilu kami minta untuk membuat, menuliskan rencana kampanye di aplikasi ini. Dan, hari pertama ini belum ada," katanya dalam Podcast Mata Lokal Memilih, Selasa (28/11).

Meski sudah memasuki masa kampanye, namun metode-metode yang tidak diperbolehkan dilakukan saat ini. Metode kampanye rapat umum dan iklan di media cetak dan elektronik baru diperbolehkan mulai 21 Januari-10 Februari 2024 mendatang.

Sementara metode kampanye yang

saat ini diperbolehkan adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, melalui media sosial, dan debat namun khusus capres dan cawapres.

"Meskipun sudah masa kampanye tetapi tetap ada aturan-aturan. Metodenya diatur, misalnya untuk alat peraga kampanye tidak boleh berada di tempat pendidikan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan kantor-kantor pemerintah. Kami mengatur lokasi-lokasi mana yang boleh dan tidak boleh," terangnya.

Shidqi menerangkan semua peserta pemilu juga telah mendeklarasikan dan berkomitmen untuk menjaga kampanye berjalan damai. Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari preventif agar kampanye di DIY berjalan damai.

"Termasuk soal konvoi, kami meminta peserta Pemilu agar bisa mengendalikan massa masing-masing terutama di jalan. Karena situasi di jalan kan berbeda. Tetapi kan tentu harus menjaga ketertiban lalu lintas,

misalnya menggunakan helm, tidak menggunakan knalpot brong, dan lainnya," terangnya.

Terkait dengan persiapan Pemilu 2024, persentase persiapan sudah mencapai 80 persen. Namun saat ini yang masih kurang adalah tahapan logistik dan pembentukan KPPS.

Anggota Bawaslu DIY, Sutrisnowati mengungkapkan pihaknya menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat preventif. Mulai dari koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder seperti KPU, TNI, Polri, hingga Satpol PP. Konsolidasi juga dilakukan hingga pengawas kecamatan. Sebab pengawasan di tingkat kecamatan menjadi modal pengawasan Bawaslu DIY dalam setiap kegiatan kampanye.

"Tentu ini menjadi hal utama, sehingga kampanye sesuai dengan aturan. Misalnya sudah ada izin dari kepolisian atau belum. Karena kan sebelum kampanye harus ada izinnya. Kemudian apakah yang menyejengakan kampanye adalah pihak-pihak yang sudah terdaftar di KPU kemarin, dan lainnya," ungkapnya. (**maw/ord**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005